

## Keluarga Miskin Ekstrem di Kota Serang Masih Banyak

**SERANG (IM)**- Keluarga miskin kategori miskin ekstrem di Kota Serang, Provinsi Banten tercatat 8.799 keluarga. Miskin ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan, kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan.

Data tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Agustus 2023. Keluarga Syarif (60), dan isterinya Aniah (54), adalah salah satu keluarga miskin ekstrem di Kota Serang.

Syarif yang tinggal di Kampung Lebak Sili, RT 03 RW 08, Kelurahan Unyur, Kota Serang, sudah dua tahun terakhir tidak bekerja karena sakit-sakitan. Syarif sebelumnya bekerja sebagai kuli panggul di Pasar Rau, Kota Serang. Sedangkan isterinya, Aniah bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan tidak menentu.

Rata-rata Aniah memperoleh Rp400 Ribu per bulan. Mereka memiliki 8 anak. Menurut Caleg Nasdem Kota Serang, Wibowo potret masyarakat Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten masih ditemukan keluarga miskin ekstrem. Jumlahnya tidak

sedikit. "Pemkot kerjanya ngapain saja, kenapa jumlah warga miskinnya masih banyak," ungkap Wibowo, Senin (13/11).

Padahal, tambah Wibowo, sesuai Inpres No 4 tahun 2022, program pengentasan kemiskinan harus selesai di tahun 2024. "Harusnya program pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas Pemkot Serang untuk diselesaikan," ujar Caleg Dapil 1 Kota Serang ini lagi. Ironisnya, banyak program bantuan pemerintah bagi keluarga miskin, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) digelontorkan. Namun jumlah keluarga miskin masih tetap membengkak.

Kondisi ini membuat Wibowo menaruh curiga dengan bantuan yang diberikan pemerintah untuk warga miskin apakah sudah tepat sasaran. Wibowo akan mengecek bantuan pemerintah itu kepada masyarakat miskin ekstrem. "Saya akan cek, apakah bantuan pemerintah itu tepat sasaran atau tidak," tegas caleg dengan nomor urut 7 itu. ● **pra**

## Semester III, Investasi di Kota Tangerang Rp3 Triliun

**TANGERANG (IM)**- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Tangerang mencatat hingga semester III 2023 jumlah realisasi investasi penanaman modal di Kota Tangerang tembus Rp 3 Triliun.

Hal itu sejalan dengan tagline yang dimiliki oleh Kota Tangerang yakni sebagai kota layak investasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Taufik Syahzaeni mengatakan, sesuai hasil verifikasi penanaman modal, jumlah investasi di Kota Tangerang pada semester III 2023 tembus sebesar Rp 3 Triliun.

Di mana, jika ditotal sejak Januari 2023, total realisasi investasi di Kota Tangerang di 2023 tembus sebesar Rp 12 Triliun.

Taufik mengatakan, investasi di Kota Tangerang masih didominasi penanaman modal dalam negeri yakni sektor sewa gedung dan sektor transportasi.

Sedangkan untuk penanaman modal asing masih didominasi oleh sektor bahan kimia dan farmasi.

"Dari realisasi semester III, penanaman modal dalam negeri mendominasi yakni sebesar Rp 2 Triliun dan Rp 1 triliun bersumber dari penanaman modal luar negeri," ujarnya.

Taufik mengatakan, realisasi investasi pada semester III telah melampaui target dari yang sebelumnya sebesar Rp 9 Triliun untuk total investasi selama 2023.

"Realisasi investasi pada tahun ini sudah melampaui target yakni sebesar Rp 12 Triliun," pungkasnya. ● **pp**



### PENGUNTA QR DI INDONESIA

Warga melakukan transaksi menggunakan QRIS di sebuah cafe di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/11). UnaFinancial yang merupakan perusahaan penyedia solusi untuk fintech, memprediksi jumlah pengguna aplikasi pembayaran Quick Response (QR) di Indonesia akan tumbuh sebesar 54 persen pada 2025 serta Indonesia akan menjadi negara dengan jumlah pengguna QR terbanyak di Asia Tenggara.

## Keramas Massal di Sungai Cisadane Diajukan Jadi Warisan Budaya

Saat ini, Kota Tangerang telah memiliki tujuh WBTB yang telah diakui secara nasional dan siap mengajukan dua lagi pada tahun mendatang. Ini adalah bukti bahwa Pemkot Tangerang mendukung tradisi dan budaya yang ada di Kota Tangerang agar tetap lestari.

**TANGERANG (IM)**- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) telah mempersiapkan pengajuan dua Warisan Budaya Tak Benda terbaru kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yakni budaya keramas massal di Sungai Cisadane dan tradisi gotong tepekong.

"Saat ini, Kota Tangerang telah memiliki tujuh WBTB yang telah diakui secara nasional dan siap mengajukan dua lagi pada tahun mendatang," kata Kepala Disbudpar, Rizal Ridholloh di Tangerang, Banten, Senin (13/11).

Rizal mengatakan tradisi-tradisi tersebut telah dilakukan oleh masyarakat Kota Tangerang sejak dahulu dan

kini tetap dilakukan secara turun temurun.

Sementara itu tujuh WBTB yang sudah dimiliki yakni Tari Coket, Tradisi Peh Cun, Orkes Gambang Kromong, Silat Beksi, Bakcang, Laksa, dan Upacara Cio Tao.

Selain itu, Disbudpar Kota Tangerang juga akan mengajukan tiga cagar budaya yaitu Makam Kapiten Oey Kiat Tjin, Gerbang Rumah Kebun Lenhoff Wergade di Kebon Besar dan Rumah Telepon yang ada di Jl. Daan Mogot.

"Ini adalah bukti bahwa Pemkot Tangerang juga mendukung tradisi dan budaya yang ada di Kota Tangerang agar tetap lestari. Sehingga, tetap dapat dinikmati, dipelajari oleh generasi selanjutnya," katanya.

Rizal berharap, pengajuan yang akan dilakukan

dapat diterima dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Tangerang. Ia juga mengimbau lara masyarakat untuk tidak melupakan dan meninggalkan tradisi-tradisi yang ada di Kota Tangerang.

"Ayo kita bersama-sama melestarikan tradisi dan budaya yang ada di Kota Tangerang. Tradisi dan budaya ini lah yang memberikan warna tersendiri bagi kita dan menjadi perbedaan dari yang lainnya. Mari kita lestarikan tradisi, seni, dan budaya yang kita miliki di Kota Tangerang," ujarnya.

Sementara itu 24 cagar budaya Kota Tangerang tersebar di beberapa wilayah di antaranya Kawasan Pasar Lama - Kelurahan Sukasari Kota Tangerang, Makam dan Masjid Jami Kaliparis - Jalan Kaliparis Indah Kelurahan

Sukasari, Kota Tangerang Klenteng Bon Tek Bio, Rumah Arsitektur Cina (Benteng Haritage), Stasiun Kereta Api Tangerang, Lembaga Pemasarakatan Anak Pria, Lapas Anak Wanita, Lapas Pemuda II A, Kelenteng Boen San Bio, Petak 9, Rumah Dinas Bekas Wakil Direktur Lapas Anak Pria.

Rumah Dinas Pegawai Lapas Anak Pria, Gedung Gede, Rumah Arsitektur Tionghoa Tan Su Ek, Rumah Arsitektur Tionghoa Lim Tian Tiang, Museum LP Anak Wanita Kota Tangerang, Pabrik Kecam Tan Giok Seng, Pintu Hek, Bundangan Pasar Baru, Makam Raden Aria Santika, Makam Raden Aria Yuda Negara, Pintu Air Kecil, Pintu Air Getek dan Taman Makam Pahlawan Taruna. ● **pp**

## TURUNKAN KEMISKINAN EKSTREM Pemrov Banten Galakkan Pembangunan RTLH dan PSU

**SERANG (IM)**- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berkomitmen menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Banten, M Rachmat Rogianto berharap, pembangunan infrastruktur dapat menangani permasalahan-permasalahan terkini masyarakat. Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemrov Banten, antara lain bedah rumah tidak layak huni (RTLH) serta peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Beberapa fasilitas umum yang ditingkatkan, yakni jalan lingkungan, pembangunan fasilitas mandi cuci kakus (MCK), serta pembangunan sarana sumber air bersih yang dilakukan Dinas DPRKP/Perkim Provinsi Banten.

Rachmat mengatakan, berbagai pembangunan tersebut bertujuan memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman warga serta menekan angka kemiskinan ekstrem.

Selain itu, Pemrov Banten juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman warga yang berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah. Rachmat menilai, sasaran substansi dari kegiatan ini adalah melakukan pembangunan infrastruktur untuk menangani lokasi kawasan permukiman warga di kabupaten/kota di Provinsi Banten.

"Capaian program tertanganinya permuki-

man warga kewenangan provinsi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan usulan dari masyarakat yang telah verifikasi," katanya dalam siaran pers, Senin (13/11).

Selain itu, Rachmat menilai, peningkatan PSU yang dilakukan dapat berimplikasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Dia menyebutkan, pembangunan infrastruktur juga dapat mendorong masyarakat yang melakukan aktivitas usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya.

"Kami berharap, program Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Jalan Lingkungan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Bisa membantu melancarkan roda ekonomi di Banten," ujarnya.

Rachmat mencontohkan, dengan jalan lingkungan yang bagus, masyarakat akan terbantu dalam menjalankan usaha sehingga perekonomian di lingkungan masyarakat berputar. "Mudah-mudahan ekonomi masyarakat menjadi mapan, maka akan berdampak pada pencegahan stunting. Sebab, bila ekonomi masyarakat sudah normal, kualitas hidup masyarakat akan meningkat," ucapnya.

Rachmat menambahkan, peningkatan PSU yang dilakukan Pemrov Banten juga merupakan upaya mewujudkan pemerataan infrastruktur. Dia memastikan, kegiatan urusan penyelenggaraan PSU permukiman bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2023. ● **pra**

## Pemkab Tangerang Imbau Pedagang Pasar Kutabumi untuk Tempati TPPS

**TANGERANG (IM)**- Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Satpol PP telah mendistribusikan surat teguran pertama kepada para pedagang yang masih beraktivitas di area Pasar Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.

Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Agus Suryana mengatakan, surat teguran itu diberikan mengingat akan disegerakannya revitalisasi Pasar Kutabumi. "Kami sudah berikan surat teguran pertama kepada 113 para pedagang sebagai tahap awal atau sosialisasi Satpol PP sebelum dilakukannya sterilisasi area. Yang di mana kita ketahui bersama, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan revitalisasi," katanya, Senin (13/11).

Agus menyebut, pemberian surat teguran pertama ini dilakukan sudah sesuai dengan prosedur penertiban. Sebanyak puluhan personel dikerahkan untuk mendistribusikan surat teguran pertama kepada seluruh pedagang pasar.

"Kita melakukan tindakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) penertiban. Ada beberapa tahap yakni surat teguran pertama hingga ketiga, surat peringatan pertama hingga ketiga. Jika surat tersebut tidak diindahkan, barulah kita akan melakukan penertiban. Tentunya kami utamakan terlebih dahulu pendekatan melalui cara yang humanis," ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja, Finny Widiyanti mengimbau kepada para pedagang yang masih bertahan berjualan di Pasar

Kutabumi dapat secara sukarela untuk segera menempati Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS).

Terkait masih adanya pedagang yang belum terverifikasi pemindahan, Finny menyebut, pihak perumda pasar masih membuka dan akan terus memberikan kesempatan bagi para pedagang yang ingin mendaftarkan dirinya untuk menempati ruang di TPPS.

"Terkait para pedagang yang belum terverifikasi untuk menempati ruang di TPPS, tentunya kami masih akan terus menerima dan akan diterima dengan baik. Bagi para pedagang yang ingin memverifikasi pemindahan segera datang kepada petugas kami yang selalu stanby di area pasar," pungkasnya. ● **pp**



### TRANSFORMASI DIGITAL PELINDO IV MAKASSAR

Pejalan kaki menempelkan kartu E-Money ke alat turnstile atau pintu putar ketika akan masuk ke Terminal Pelabuhan Indonesia Regional IV Makassar, Sulsel, Senin (13/11). Pemasangan alat turnstile tersebut merupakan upaya transformasi digitalisasi untuk menjadikan area Pelabuhan Makassar zero pungutan liar.



### OUTLET SUVENIR RESMI PIALA DUNIA U-17

Petugas menunjukan boneka maskot Bacuya Piala Dunia U-17 Indonesia 2023 di official shop resmi kawasan Stadion Manahan, Solo, Jateng, Senin (13/11). Store Juara yang menjadi penyedia souvenir resmi Piala Dunia U-17 membuka outlet khusus yang berada di empat stadion yang menjadi venue pertandingan Piala Dunia U-17.

## Permintaan Properti di Kawasan IKN Makin Meningkat

**KUTAI KARTANEGARA (IM)**- Berdasarkan hasil riset dari perusahaan teknologi real estate 99 Group, permintaan properti di beberapa kota di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin meningkat. Head of Research 99 Group Marisa Jaya menyampaikan bahwa permintaan properti di dua kota terdekat dari IKN, yakni Balikpapan dan Samarinda masing-masing mengalami peningkatan sebesar 57 persen dan 1 persen secara year-to-date (ytd) hingga September 2023.

"Ini kita coba lihat dari dua kota terdekat di IKN ya, Balikpapan dan Samarinda. Nah, kalau untuk Balikpapan dan Samarinda, year-to-date dari Januari sampai September, pertumbuhan permintaan di Balikpapan itu sebesar 57 persen dan Samarinda 1 persen," kata Marisa seperti dilansir dari Antara, Senin (13/11).

Sedangkan di daerah lain seperti Berau, Bontang, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, permintaannya masih di bawah 1 persen. Marisa menilai tren permintaan properti di kota-kota kawasan IKN tersebut masih cenderung fluktuatif setiap bulannya. Hasil riset juga mencatatkan pertumbuhan permintaan properti di Balikpapan secara tahunan (year-on-year/yooy) tercatat sebesar 149,8

persen dan Samarinda sebesar 28,7 persen.

Lebih lanjut, jika dilihat dari preferensi berdasarkan tipe properti, kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan mencatatkan pencarian yang tinggi untuk rumah tapak, masing-masing sebesar 48,1 persen dan 59,4 persen. Selain dua kota besar itu, terdapat kota-kota lain dengan proporsi permintaan rumah tapak yang tinggi seperti Bontang sebesar 60 persen, dan Kutai Timur sebesar 33,3 persen. "Jika dibandingkan dengan kota besar lain di Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya, permintaan ruko di Kalimantan Timur cukup tinggi, hal tersebut juga dipengaruhi karena banyak kawasan yang masih berkembang dan umumnya memanfaatkan ruko untuk berbagai kegiatan komersial, seperti dijadikan kantor, ruang usaha, bahkan perhotelan," jelas Marisa.

Marisa menambahkan, beberapa area lain yang mencatatkan permintaan paling kecil terhadap rumah tapak, namun memiliki minat tertinggi di tanah atau lahan kosong adalah Penajam Paser Utara yang tercatat sebesar 88 persen, Kutai Kartanegara sebesar 86,7 persen dan Berau 62,9 persen. ● **pra**